



KR-Franz Boedisukarnanto

SYAWALAN 'KR GROUP': Keluarga Besar PT BP 'Kedaulatan Rakyat' menggelar Syawalan 1446 H di Halaman 'KR', Jalan Margo Utomo, Yogyakarta, Selasa (8/4/2025). Syawalan diikuti ratusan karyawan, Komisaris, dan Jajaran Direksi termasuk Direktur Utama Drs HM Idham Samawi (paling kiri), diakhiri dengan berjabat tangan untuk saling memaafkan.

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

8.000 KPM di DIY Diusulkan Dicoret

YOGYA (KR) - Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan sekitar 8.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di provinsi ini dicoret dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) atau graduasi, karena tidak lagi memenuhi kriteria atau telah mandiri secara ekonomi.

"Dari evaluasi kami bersama para pendamping PKH, ternyata memang sudah banyak yang seharusnya digraduasi, karena kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Mereka sudah bekerja, punya usaha, dan tidak lagi tergolong miskin," ujar Kepala Dinsos DIY Endang Patmintersih di Yogyakarta, Selasa (8/4).

Endang menyebut, PKH yang sudah berjalan sejak 2007 semestinya mampu mendorong

penurunan angka kemiskinan. Namun, lanjutnya, dalam praktiknya masih ditemukan penerima manfaat yang enggan keluar dari daftar penerima bantuan sosial itu meski sudah mampu secara finansial.

"Kami berharap masyarakat jujur. Kalau sudah tidak layak, ya seharusnya mengundurkan diri. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Sekarang saya harus lebih tegas. Kalau sudah mampu, ya harus digraduasi,"

ujarnya.

Proses graduasi ini, lanjut Endang, saat ini masih menunggu pemutakhiran data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak Januari 2025 Dinsos DIY diminta menggunakan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang dikelola BPS untuk memastikan akurasi data KPM.

"Kami masih menunggu DT-SEN ini agar data yang akan kami graduasi bisa disepandikan. Jadi tidak asal mengeluarkan, semua harus berbasis data yang sah," ucapnya.

Selain aspek ekonomi, Endang menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat soal mentalitas penerima bantuan. Ia berharap

media juga turut berperan dalam mengedukasi masyarakat agar malu mengaku miskin, manakala sebenarnya sudah mampu.

"Masalah sekarang bukan hanya ekonomi, tapi mental. Banyak yang sudah nyaman menerima bansos. Ini yang harus kita ubah. Saya sering bilang, malu dong kalau orang Yogya ngaku miskin padahal sudah mampu," ujarnya.

Dinsos DIY menargetkan usulan graduasi ini bisa segera diproses begitu DTSEN tersedia secara lengkap. Kebijakan itu, kata Endang, diharapkan bisa memastikan bantuan sosial PKH lebih tepat sasaran untuk mendorong kemandirian sosial ekonomi masyarakat. **(Ant)-f**

USAI REGULASI DIPANGKAS

29.000 Distributor Pupuk Protes

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, setidaknya sekitar 29.000 distributor pupuk mengeluhkan setelah Pemerintah memangkas regulasi terkait distribusi pupuk ke petani.

Saat menghadiri acara sarasehan ekonomi bertajuk 'Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan' di Jakarta, Selasa (8/4), Presiden mengatakan, distribusi pupuk kini dilakukan dari pabrik langsung ke petani guna mengurangi tingginya biaya produksi karena tengkulak (middle man). "Kenapa terlalu banyak perantara, middle man-middle man. Hak apa itu mereka mengutip-ngutip uang rakyat, untuk rakyat. Ada yang datang ke saya, (bilang) 'ada 29.000 distributor yang marah sama bapak'," kata Prabowo.

Dalam sambutannya di depan pelaku ekonomi, Prabowo menjelaskan bahwa ia mendapat laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, perihal panjangnya birokrasi distribusi pupuk bersubsidi ke petani.

Presiden menerima informasi, distribusi pupuk dari pabrik hingga ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) harus melalui

persetujuan dan tanda tangan 15 menteri, 30 gubernur, dan 500 bupati. "Saya bilang Mentan, 'nggak ada, dari pabrik pupuk langsung ke petani, nggak ada lagi tanda tangan-tanda tangan'. Alhamdulillah pupuk yang tadinya langka, diselundupkan, dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, Pemerintah akan lebih memprioritaskan kesejahteraan petani yang mencapai 30 juta orang, dengan perkiraan masing-masing memiliki 4 anggota keluarga. "Ada berapa petani di Indonesia? Hampir 30 juta. Keluarga mereka (ada) empat. 29.000 lawan 120 juta, menang siapa? Oh lebih baik saya membela 120 juta rakyat daripada mereka-mereka itu," kata Prabowo.

Kepala Negara menambahkan, masih ada beberapa provinsi yang mengeluhkan distribusi pupuk kurang lancar, salah satunya Aceh. Namun, Presiden menjanjikan masalah tersebut segera diatasi. Ia menilai kendala tersebut menjadi pelajaran agar Pemerintah Pusat harus lebih proaktif ke daerah. **(Ant/San)-f**

PROYEK TANGGUL LAUT RAKSASA

Menko IPK Bentuk Badan Otorita

JAKARTA (KR) - Presiden RI menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membentuk semacam badan terkait tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Hal ini dikarenakan tidak hanya kementerian PU, namun terdapat beberapa kementerian dan pemangku kepentingan yang nantinya harus bersama-sama untuk menyelesaikan proyek tersebut.

"Tanggul Laut Raksasa itu sebenarnya Giant Sea Wall, Presiden sudah menugaskan kepada Menko IPK untuk membentuk semacam badan otorita. Badan terkait Giant Sea Wall itu nantinya akan berada di bawah Kemenko IPK," ungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Selasa (8/4).

Menurutnya, proyek tanggul laut raksasa ini proyek yang besar, dari Tangerang, Banten sampai ke

Gresik, Jawa Timur. Sehingga harus ada badannya. Kemenko IPK sedang merintis hal itu.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan terus mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk mengatasi berbagai persoalan jangka panjang, seperti banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence). Termasuk membahas perencanaan skema pendanaan inovatif yang kemungkinan melibatkan semua pihak, baik swasta dalam maupun luar negeri.

Sementara Menteri PU Dody Hanggodo berkomitmen akan melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya. **(Ant/Has)-d**

KOALISI MASYARAKAT SIPIL TEMUI DPR

Pembahasan RKUHAP Diminta Terbuka

JAKARTA (KR) - Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibahas secara terbuka dalam setiap tahapannya. Permintaan ini disampaikan saat menemui pimpinan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/4).

Koalisi Masyarakat Sipil itu mulai dari YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, hingga Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Mereka pun berdiskusi dengan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhan.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, proses pembahasan undang-undang di DPR RI harus diperbaiki agar ada kejujuran dan membangun kepercayaan dari masyarakat. "Kami juga mendesak agar proses itu setiap tahapan dibuka, disampaikan kepada publik. Agar apa? Agar apa yang mereka bahas itu sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.

Menurut Isnur, ada draf RUU tersebut

yang tiba-tiba muncul tanpa adanya pembahasan terbuka. Draf yang diterima itu pun menimbulkan banyak pertanyaan karena cenderung membuka potensi *abuse of power* yang bisa dilakukan aparat dalam penyidikan.

Untuk itu, Isnur mendesak agar Komisi III DPR RI hati-hati dalam membahas RUU tersebut agar bisa menghadirkan penyelesaian bagi masalah-masalah penegakan hukum yang kerap timbul sehari-hari. "Jadi kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni," katanya.

Menurut Isnur, pembahasan RUU tersebut harus bisa menampung aspirasi seluruh elemen masyarakat agar masalah-masalah yang selama ini tertampung bisa tertangani. Jangan sampai, pembahasan RUU tersebut dikejar waktu, tapi tidak menyelesaikan masalah. "Ada gambaran yang disampaikan bahwa DPR punya ruang yang terbatas, ada pembicaraan seolah-olah berat untuk mencapai sesuatu yang ideal. Nah kami tidak menghendaki hal seperti itu," tandasnya. **(Ant/Has)-d**

TERSANDUNG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Kemdiktisaintek Tindaklanjuti Guru Besar UGM

JAKARTA (KR) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengamobil tindakan lanjutan terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berinisial EM.

"Kementerian telah menerima laporan Satgas PPKS dari Pimpinan PT dan segera melakukan tindaklanjut," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Togar M Simatupang saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Selasa (8/4).

Togar menegaskan, hal ini merupakan pelanggaran berat, sehingga otoritas terkait perlu membentuk tim pemeriksa sesuai dengan penegakan disiplin PNS, berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 bahwa setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan

dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

Ia menilai hal ini sangat memprihatinkan, sebab institusi pendidikan seperti Perguruan Tinggi tidak selayaknya menjadi tempat melakukan kegiatan yang tidak bermoral tersebut. "Tentunya sangat memprihatinkan ketika PT sebagai garda terdepan nilai-nilai kemanusiaan masih ada oknum yang mencorei nilai-nilai tersebut," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi di Perguruan Tinggi lainnya, Togar mengimbau agar setiap Perguruan Tinggi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai indikator keadaban dan mempunyai mekanisme untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi kekerasan seksual.

"Pimpinan Perguruan Tinggi diminta segera melakukan sosialisasi,

kesadaran tantangan dan ancaman kekerasan seksual, dan membentuk Satgas PPKS," ucap Togar M Simatupang.

Sebelumnya, Pimpinan UGM menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi UGM berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa. Sekretaris UGM Andi Sandi menjelaskan, sanksi berat itu berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PPKS UGM yang menyatakan EM bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen.

"Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku," kata Andi.

(Ant)-f

DPD RI DIY EVALUASI PERDA-RAPERDA

Kabupaten/Kota Segera Buat Roadmap Manajemen Sampah



KR-Devid Pernama

GKR Hemas (kedua kiri) didampingi Anggota DPD RI DIY menyampaikan paparan terkait persoalan sampah.

Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan.

"Meski telah terdapat berbagai peraturan di atas, saya melihat masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapannya. Antara lain kurangnya sinkronisasi antarperaturan, lemahnya pengawasan implementasi kebijakan, dan minimnya political will Pemkab/Pemkot dalam menjadikang pengelolaan sampah sebagai prioritas

pembangunan. Apalagi, seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi serta tingginya wisatawan di DIY yang semakin meningkat, produksi sampah juga meningkat signifikan," kata Hemas.

Turut hadir Anggota DPD RI DIY lainnya yaitu Ir Ahmad Syaqui Soeratio MM dan Dr H Hilmy Muhammad MA, serta RA Yashinta Sekarwangi Mega yang memberikan arahan dan masukan. Raker diikuti

perwakilan Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Bappeda, dan OPD terkait), akademisi dan pakar lingkungan, perwakilan komunitas dan LSM lingkungan, pelaku usaha pengelolaan sampah, tokoh masyarakat dan media. Dalam raker disampaikan paparan dari narasumber terkait kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah. Dilanjutkan diskusi panel untuk membahas tantangan dan solusi dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota se-DIY.

Menurut Hemas, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah sudah tersentral di masing-masing kabupaten/kota. "Namun, masalah yang kemudian lahir ialah keterbatasan ruang pengelolaan sampah serta teknologi yang digunakan. Terutama di kota, seperti keterbatasan ruang pengelolaan sampah menjadi PR tersendiri," ujarnya. **(Dev)-f**